



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Analisis Sengketa Sungai Nil: Upaya Ethiopia dalam  
Melawan Dominasi Mesir di Nil**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Ruben Richardo Manurung

2016330211

Bandung

2019



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Analisis Sengketa Sungai Nil: Upaya Ethiopia dalam  
Melawan Dominasi Mesir di Nil**

Skripsi

Oleh

Ruben Richardo Manurung

2016330211

Pembimbing

Idil Syawfi S.IP., M.Si.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

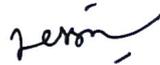
Nama : Ruben Richardo Manurung  
Nomor Pokok : 2016330211  
Judul : Analisis Sengketa Sungai Nil: Upaya Ethiopia dalam Melawan Dominasi Mesir di Nil

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 8 Januari 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Jessica Martha, S.IP, M.I. Pol.

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Idil Sywafi, S.IP., M.Si

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ruben Richardo Manurung  
NPM : 2016330211  
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Analisis Sengketa Sungai Nil:  
Upaya Ethiopia dalam Melawan  
Dominasi Mesir di Nil.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Desember 2019



Ruben Richardo Manurung

## ABSTRAK

Nama : Ruben Richardo Manurung  
NPM : 2016330211  
Judul : Analisis Sengeketa Sungai Nil: Upaya Ethiopia dalam Melawan Dominasi Mesir di Nil

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Ethiopia dalam melawan dominasi Mesir di Cekungan Sungai Nil. Hal ini terjadi dikarenakan Mesir telah mendominasi Nil sepanjang abad ke-20 melalui “hak alami dan historis” yang ia miliki berdasarkan perjanjian 1929 dan 1959. Perjanjian tersebut mengecualikan negara-negara *riparian* Nil lainnya termasuk Ethiopia dengan memuat ketentuan alokasi air terhadap Mesir sebesar 55 milyar kubik per tahun serta menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah pengembangan proyek-proyek hidro negara hulu terutama pembangunan bendungan berskala besar membuat Ethiopia tidak pernah bisa mengembangkan potensinya dalam mengontrol lebih banyak air Nil di abad ke-20. Oleh karena itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian **bagaimana upaya Ethiopia dalam melawan dominasi Mesir di Nil?** Untuk menjelaskan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka *Hydro-Hegemony Theory* yang melihat bahwa dalam suatu regional sungai tertentu, negara terkuat berdasarkan evaluasi empat pilar *Hydro-Hegemon* memiliki kekuatan untuk mengkonsolidasikan aliran air sungai. Berdasarkan kerangka tersebut, ditemukan bahwa perlawanan Ethiopia dimulai melalui strategi kontra hegemoni lewat penguatan daya tawar dalam keanggotaanya di *Nile Basin Initiatives* dengan mengangkat prinsip “*equitable use*” ke dalam agenda hidropolitik di Nil. Setelah itu, Ethiopia perlahan-lahan memperkuat dimensi kekuatannya berdasarkan empat pilar *Hydro-Hegemony* yang kemudian membuatnya dapat menggeser posisi Mesir sebagai *hydro hegemon* di Nil. Dengan menggunakan dan mengedepankan upaya-upaya yang didasari dengan prinsip-prinsip keadilan dan keuntungan bersama, Ethiopia berhasil menjadi hegemon positif di Nil.

Kata Kunci : Nil, *hydro-hegemony*, *riparian*, *Nile Basin Initiatives*, Perjanjian 1929 & 1959, Ethiopia, Mesir

## ABSTRACT

Name : Ruben Richardo Manurung

NPM : 2016330211

Title : *Analysis of the Nile River Dispute: Ethiopia's Efforts in Combating Egyptian Domination in the Nile*

---

*This study aims to explain the efforts made by Ethiopia in countering Egyptian domination in the Nile Basin. This happened because Egypt had dominated the Nile throughout the 20th century through its "natural and historical rights" under the treaties of 1929 and 1959. The agreement excluded other Nile riparian countries including Ethiopia by including provisions on water allocation to Egypt of 55 billion cubic per year as well as being an effective instrument to prevent the development of upstream hydro projects especially the construction of large-scale dams making Ethiopia never able to develop its potential in controlling more Nile water in the 20th century. Therefore, the authors formulate a research question **what is Ethiopia's effort in countering Egyptian domination in the Nile?** To explain this problem, this study uses the Hydro-Hegemony Theory framework which sees that in a particular river region, the strongest country based on the evaluation of the four pillars of Hydro-Hegemon has the power to consolidate river water flow. Based on this framework, it was found that the Ethiopian resistance began through a counter hegemony strategy through strengthening bargaining power in its membership in the Nile Basin Initiatives by elevating the principle of "equitable use" into the hydropolytic agenda in the Nile. After that, Ethiopia slowly strengthened its power dimension based on the four pillars of the Hydro-Hegemony which later made it able to shift Egypt's position as a hydro hegemon in the Nile. By using and prioritizing efforts based on the principles of justice and mutual benefit, Ethiopia succeeded in becoming a positive hegemon in the Nile.*

*Keywords: Nile, hydro-hegemony, riparian, Nile Basin Initiatives, 1929 & 1959 Agreements, Ethiopia, Egypt*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Analisis Sengeketa Sungai Nil: Upaya Ethiopia dalam melawan Dominasi Mesir di Nil” disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam jenjang Pendidikan Strata satu (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis sangat menerima saran dan kritik yang dapat melengkapi skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat membawa bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 15 Desember 2019

Ruben Richardo Manurung

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2. Identifikasi Masalah</b> .....	6
<b>1.2.1. Pembatasan Masalah</b> .....	9
<b>1.2.2. Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	11
<b>1.3.1 Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>1.3.2 Kegunaan Penelitian</b> .....	11
<b>1.4 Kajian Literatur</b> .....	12
<b>1.5. Kerangka Pemikiran</b> .....	15
<b>1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data</b> .....	20
<b>BAB II</b> .....	24
<b>2.2 Perlawanan Ethiopia terhadap Status Quo di Nil</b> .....	27
<b>2.3 Nile Basin Initiatives dan Cooperative Framework Agreement</b> .....	30
<b>2.4 Kegagalan Mesir dalam Mempertahankan Status Quo di Nil</b> .....	34
<b>2.4.1 Hilangnya Kemampuan Mesir dalam Menghalau Pendanaan Bendungan Negara Hulu</b> .....	36
<b>2.4.2 Melemahnya Propaganda dan Ancaman Militer Mesir</b> .....	40
<b>2.4.3 Ketidakmampuan Mesir Menentukan Agenda Hidropolitik dalam NBI</b> .....	44
<b>3.1 Strategi Kontra-Hegemoni oleh Ethiopia terhadap Mesir</b> .....	50
<b>3.2 Determinasi Ethiopia Menjadi Hegemon di Nil</b> .....	53

3.3.1 Letak Geografis Ethiopia .....	54
3.3.2 Kekuatan Material Ethiopia .....	59
3.3.3 Daya Tawar Ethiopia.....	67
3.3.4 Kekuatan Ideasional Ethiopia .....	73
3.5 Konfigurasi <i>Hydro Hegemony</i> di Abad ke-21 .....	74
<b>BAB IV</b> .....	79
<b>KESIMPULAN</b> .....	79
<b>Daftar Pustaka</b> .....	84

## DAFTAR GRAFIK, GAMBAR DAN TABEL

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Empat pilar <i>hydro-hegemony</i> menurut Mark Zeitoun dan Zeroen Warner.....	19
Tabel 3.1 Konfigurasi empat pilar dimensi <i>hydro hegemony</i> tahun 2009 menurut Mark Zeitoun dan Ana Elisa Cascao .....	77
Tabel 3.2 Konfigurasi empat pilar <i>hydro hegemony</i> tahun 2011 Menurut Mark Zeitoun dan Ana Elisa Cascao .....	77
Tabel 3.3 Konfigurasi dimensi <i>hydro hegemony</i> di Nil tahun 2019 oleh penulis.....	78

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi pembangunan <i>Grand Ethiopian Renaissance Dam</i> di hulu Nil	57
--	----

### DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Langkah-langkah Penelitian Kualitatif oleh Alan Bryman .....	21
Grafik 3.1 Perbandingan PDB Mesir dan Ethiopia akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21 .....	63
Grafik 3.2 Perkembangan anggaran militer Mesir periode 2010-2018 .....	65
Grafik 3.3 Perkembangan anggaran militer Ethiopia periode 2010-2018 .....	65

**DAFTAR SINGKATAN**

NBI	<i>Nile Basin Initiatives</i>
GERD	<i>Grand Ethiopian Renaissance Dam</i>
CFA	<i>Cooperative Framework Agreement</i>
HYDROMET	<i>Hydrometeorological Survey</i>
WB	<i>World Bank</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
EIB	<i>European Investment Bank</i>
AFDB	<i>African Development Bank</i>
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
AS	Amerika Serikat
TECCONILE	<i>Technical Cooperation Committee for the Promotion of Development and Environmental Protection of the Basin</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Semenjak abad ke-20, Sungai Nil telah menjadi sumber tensi politik dan konflik berintensitas rendah atau *low-intensity conflict* (LIC) antara dua negara *riparian* utama yaitu Mesir dan Ethiopia menyangkut masalah hak dan akses terhadap Sungai Nil.<sup>12</sup> Pentingnya Nil sebagai sumber air membuat setiap negara *riparian* terus berupaya untuk memaksimalkan jatah air volumetrik mereka.<sup>3</sup> Tuntutan setiap negara *riparian* untuk memenuhi tingginya kebutuhan air dikarenakan mayoritas negara tersebut dihadapkan dengan isu-isu penting seperti peledakan populasi, pencemaran lingkungan sungai, adanya kebutuhan akan saluran irigasi serta minimnya curah hujan yang kemudian menaruh tekanan besar terhadap Sungai Nil dimana setiap negara

---

<sup>1</sup>*Riparian* adalah istilah bagi negara-negara yang secara geografis terletak di tepi sebuah sungai tertentu. Dalam konteks cakupan Sungai Nil ada 11 negara yang dikategorikan sebagai negara tepi sungai yaitu: Mesir, Sudan, Ethiopia, Tanzania, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Rwanda, Kenya, Eritrea dan Sudan Selatan.

<sup>2</sup> Konflik berintensitas rendah atau *low-intensity conflict* (LIC) adalah konflik militer antara dua atau lebih negara atau non-negara yang intensitasnya berada dibawah level perang konvensional.

<sup>3</sup> Swain, Ashok. "Challenges for Water Sharing in the Nile Basin: Changing geo-politics and Changing Climate." *Hydrological Science Journal*. 56 (2001): 1-5.

memandang Nil menjadi sumber air utama dan vital terhadap ketahanan air mereka.<sup>4</sup> Minimnya konsolidasi politik dan kerjasama regional antara negara *riparian* membuat tidak adanya pembagian air yang adil dan sah. Selain itu ketiadaan keadilan dalam pembagian air diantara negara-negara *riparian* dipicu oleh adanya dominasi Mesir terhadap Sungai Nil dalam perjanjian tahun 1929 dan 1959 yang ditandatangani pada era kolonial bersama Inggris dimana perjanjian tersebut menjadi dasar dari hak alami dan historis atau *natural and historic rights* negara hilir di Nil. Perjanjian ini dilakukan secara eksklusif hanya melibatkan Mesir dan Sudan dengan menghiraukan delapan negara *riparian* lainnya terutama Ethiopia.<sup>5</sup>

Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1929 dan 1959 ini secara spesifik mengatur hak Mesir terhadap volumetrik air dari Sungai Nil sebesar 55,5 milyar meter kubik per tahun (tiga perempat) dan Sudan sebesar 18,5 milyar meter kubik per tahun (satu perempat) dari keseluruhan Nil dan mencegah negara *riparian* lain dalam menggunakan hampir seluruh bagian air dari Sungai Nil. Perjanjian tersebut juga mencegah adanya konstruksi hidrolis apapun dari negara hulu yang berpotensi dapat mengancam aliran air ke negara hilir, membuat kapasitas kontrol air sungai Nil oleh negara hulu seperti Ethiopia menjadi sangat lemah.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dasar hukum yang diciptakan dari perjanjian 1929 dan 1959 membuat Mesir dan Sudan mendominasi

---

<sup>4</sup> Swain, Ashok. (1997). Ethiopia, the Sudan and Egypt: The Nile River Dispute. *Journal of Modern African Studies*. Vol. 35 (4), 675-694.

<sup>5</sup> Oestigaard, Terje (2012). *Nile River*. Germany: Berkshire Publishing Group. Hlm. 7

<sup>6</sup>*Ibid.*

aliran di regional timur-laut Afrika atas Nil dan mempertahankan *status quo* hingga abad ke 21.<sup>78</sup>

Secara geografis sengketa Nil ditinjau dari dua sisi dimana Mesir dan Sudan tergolong sebagai negara hilir (*downstream*) yang memegang teguh pandangan terhadap hak alami dan historis dalam perjanjian 1929 dan 1959, serta negara hulu (*upstream*) yang terdiri dari, Ethiopia, Uganda, Kenya, Eritrea, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Tanzania yang posisinya sangat tidak diuntungkan dengan adanya perjanjian tahun 1929 dan 1959 oleh negara hilir. Oleh karena itu, fokus dari sengketa Sungai Nil adalah pertentangan diantara negara hulu, terutama Ethiopia terhadap klaim historis oleh negara Mesir dan Sudan sebagai negara hilir. Eksistensi perjanjian tahun 1929 dan 1959 yang masih berlaku hingga sekarang, merepresentasikan dilema hidro-politik di Sungai Nil – negara hilir ingin mempertahankan *status quo* dari perjanjian 1929 dan 1959 sementara negara hulu mempunyai intensi untuk menggantikannya dengan perjanjian multilateral berbasis terhadap prinsip “*equitable sharing*”.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya, beberapa perjanjian berbasis insitusional telah dibentuk oleh negara-negara *riparian* dalam menyelesaikan sengketa ini. *The Nile Basin Initiatives* (NBI) adalah salah satu bentuk kerjasama antar pemerintah di

---

<sup>7</sup> Rosber, Andreas Holm. (2014). Egypt, Ethiopia, and the Nile: Understanding Egypt’s Refusal to Renegotiate 1929 and 1959 Agreement Concerning Rights and Allocations of the Nile (*Unpublished master’s thesis*) University of Oslo, Sweden. Hlm. 19

<sup>8</sup> Gebreluel, Goitom. (2014). Ethiopia’s Grand Renaissance Dam: Ending Africa’s Oldest Geopolitical Rivalry? *The Washington Quarterly*. pp. 1-14.

<sup>9</sup> Waterbury, J. “The Nile Basin National Determinants of Collective Action.” (2004) New Haven: Yale University Press.

Cekungan Sungai Nil pertama yang dibentuk pada tahun 1999 dengan basis “kerjasama yang dapat diterima seluruh pihak”, yang beranggotakan sepuluh negara *riparian* sekaligus. NBI dibentuk dalam upaya mengembangkan “*the river in a cooperative manner*” yaitu landasan kerjasama yang kuat mengenai Sungai Nil, pembagian keuntungan sosio-ekonomi yang substantif serta meningkatkan perdamaian dan keamanan regional.<sup>10</sup> Sebagai pihak ketiga, Bank Dunia turut memegang peran yang krusial terhadap penyatuan negara-negara *riparian* dimana hampir seluruh negara *riparian* ikut serta di dalam dalam NBI kecuali Eritrea yang hanya memegang status *observer*.<sup>11</sup>

Kerjasama hidro-politik antara negara *riparian* meliputi dua proses yang paralel. NBI yang mana adalah sebuah mekanisme insitusional transisional, turut dibarengi dengan *Cooperative Framework Agreement (CFA)* yang adalah sebuah proses negosiasi untuk mencapai institusi yang legal dan permanen perihal kerjasama negara *riparian* dalam bentuk institusi legal dengan aturan-aturan yang mengikat, yaitu *Nile Basin Commission*. Negosiasi CFA dimulai pada tahun 1997 dan berakhir pada 2007. Selama sepuluh tahun proses negosiasi berjalan, tujuan dari CFA masih belum

---

<sup>10</sup> Cascão, Ana Elisa. “Changing Power Relations in the Nile River Basin: Unilateralism vs Cooperation?” *Water Alternatives*. 2 (2009): 245-268.

<sup>11</sup> NBI Secretariat,

[http://www.nilebasin.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=13&Itemid=42](http://www.nilebasin.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=42) Diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

bisa tercapai adanya kebuntuan politik akibat perbedaan kepentingan negara hulu dan hilir terus mewarnai kegagalan proses kerjasama.<sup>12</sup>

Namun kebangkitan Ethiopia di pertengahan 1990-an mulai memberikan dampak signifikan terhadap proses kerjasama baik di dalam NBI maupun CFA. Ethiopia bertindak sebagai pemimpin negara hulu dalam mencegah adanya agenda-agenda oleh negara hilir untuk mempertahankan *status-quo* mereka. Senada dengan negara hulu lainnya, Ethiopia melalui NBI dan CFA ingin menciptakan basis kerjasama yang baik antara negara *riparian* berdasarkan prinsip “*equitable use*” dan mempromosikan utilitas air Sungai Nil yang adil bagi setiap negara *riparian*, termasuk akses terhadap konstruksi proyek hidrolik oleh negara hulu.<sup>13</sup> Untuk itu tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang dampak kebangkitan Ethiopia di abad ke-21 terhadap relasi hidropolitik yang ada di Cekungan Sungai Nil terutama dalam perlawanannya terhadap *status quo* di Cekungan Sungai Nil.

---

<sup>12</sup> Gebreluel, Goitom. Ethiopia’s Grand Renaissance Dam: Ending Africa’s Oldest Geopolitical Rivalry? *The Washington Quarterly*. (2014). Hlm. 6

<sup>13</sup> Adelphi, Foreign Office. Disputes Overt the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Diakses dari <https://library.ecc-platform.org/conflicts/eastern-nile-basin-dispute-over-millennium-dam-ethiopia> pada tanggal 3 Maret 2019.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Sengketa Sungai Nil secara garis besar didasari oleh adanya dominasi Mesir di Nil yang berdampak pada terbatasnya hak dan akses negara hulu terutama Ethiopia terhadap Sungai Nil. Nihilnya pembagian volumetrik air yang adil dan merata terhadap setiap negara Cekungan Sungai Nil dikarenakan tidak adanya hukum internasional yang mengikat secara holistik terhadap negara-negara tersebut. Hal ini menjelaskan fenomena 250 cekungan sungai di dunia termasuk Nil adalah subyek dari ratusan perjanjian dan traktat.<sup>14</sup> Dalam sengketa Sungai Nil, ketiadaan perjanjian internasional yang mengikat membuat negara tepi sungai harus berkonsolidasi dan menciptakan sendiri perjanjian dan kesepakatan terhadap pembagian jatah air sungai.<sup>15</sup>

Meskipun tidak ada perjanjian internasional yang bersifat mengikat di level internasional, namun terdapat dua instrumen legal yang mengatur *shared water courses* yaitu: *United Nations Convention on the Law on Non-Navigational Uses of International Watercourses of 1997* dan *Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers*. Kedua hukum internasional ini dijadikan sebagai dasar dalam memanifestasikan penggunaan air di seluruh dunia dengan dua prinsip utama yaitu “*equitable use*” dan “*duty not to cause significant harm*” yang masing-masing berarti pembagian air secara adil dan merata dan penggunaan air yang tidak menciderai negara

---

<sup>14</sup> Joyeeta Gupta. “The Watercourses Convention, Hydro-hegemony and Transboundary Water Issues, The International Spectator.” *Italian Journal of International Affairs* 51 (2016): 118-131

<sup>15</sup> Pearce, Fred. “On the River Nile, a Move to Avert a Conflict Over Water. *Yale School of Forestry & Environmental Studies*.” Hlm. 1

lain.<sup>16</sup> Kedua pandangan tersebutlah menjadi basis pertentangan dalam sengketa Nil, dimana Mesir memegang teguh prinsip “*duty not to cause significant harm*” dalam menjustifikasi penolakannya terhadap segala konstruksi bendungan dari negara hulu yang dapat mengancam aliran air ke hilir Nil, serta Ethiopia yang menuntut adanya kesamaan hak dalam penggunaan dan pengeksploitasian air Nil berdasarkan prinsip “*equitable use*”.

Pada perkembangannya, perjanjian mengenai pembagian air yang adil dan merata tidak pernah terwujud bahkan hingga saat ini. Mesir terlebih dahulu menciptakan perjanjian bilateral yang kuat dalam pengaturan volumetrik air Nil sejak tahun 1929. Secara historis, stabilitas ekonomi-politik Mesir jauh mengungguli negara *riparian* terutama Ethiopia. Oleh karena itu, pada masa kolonial Inggris, perjanjian 1929 dan 1959 hanya dinegosiasikan oleh Inggris, Mesir dan Sudan, menghiraukan negara jajahan Inggris lainnya seperti Tanzania, Uganda, termasuk Ethiopia.<sup>17</sup>

Pengecualian negara-negara hulu Nil dalam perjanjian tersebut sangat berdampak pada dominasi Mesir di Nil, dimana sepanjang abad ke-20 Mesir terus melakukan upaya pertahanan terhadap *status quo* di Nil dengan cara mencegah adanya konstruksi hidrolik dan proyek-proyek konstruksi dari negara hulu termasuk

---

<sup>16</sup> UN Watercourses Convention, “*Evolution of the UN Watercourses Convention.*” Diakses dari <http://www.unwatercoursesconvention.org/importance/evolution-of-the-un-watercourses-convention/> pada tanggal 6 Maret 2019.

<sup>17</sup> Michael P. Link. “On Foes and Flows: Vulnerabilities, Adaptive Capacities and Transboundary Relations in the Nile River Basin in Times of Climate Change.” (2012). Diakses dari <https://www.cairn.info/revue-1-europe-en-formation-2012-3-page-99.htm?contenu=article> pada tanggal 1 Maret 2019.

Ethiopia.<sup>18</sup> Selain itu konstruksi *Aswan High Dam* pada tahun 1971 kian memperkuat kapasitas kontrol Mesir di Cekungan Sungai Nil melampaui seluruh negara *riparian* Nil lainnya. Hal tersebut dapat dicapai Mesir melalui superioritasnya dalam kekuatan ekonomi, politik, militer serta dukungan banyak pihak eksternal seperti Bank Dunia, Amerika Serikat serta Rusia. Keunggulan Mesir secara struktural dibandingkan dengan negara *riparian* Nil tersebutlah yang membuat Mesir dapat menyandang status sebagai hegemon di Nil hingga abad ke-21.

Oleh karena perbedaan kekuatan struktural tersebut, sepanjang abad ke-20 negara hulu seperti Ethiopia tidak pernah bisa mengembangkan dan memaksimalkan potensi sumber daya air mereka. Namun perubahan ekonomi dan politik di regional timur Cekungan Sungai Nil pada abad ke-21 menyebabkan perubahan relasi hidropolitik antara negara *riparian*. Ethiopia yang dahulu identik dengan kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, terjajah, lemah dalam memperoleh donor eksternal, insitusi dan regulasi air yang kuat mulai mengalami perubahan yang signifikan pada abad ke-21.<sup>19</sup> Peningkatan populasi, ekonomi, dan stabilitas politik membuat Ethiopia memiliki kapasitas untuk memulai konstruksi *hydropower* dan mulai berani untuk menantang *status quo* dan dominasi Mesir di Nil. Hal tersebut ditandai dengan konstruksi secara

---

<sup>18</sup> Arsano, Y. and Tamrat, I. "Ethiopia and the eastern Nile basin." *Aquatic Sciences Journal* 67 (2005): 15-27.

<sup>19</sup> Cascão, *op.cit.*

unilateral *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) oleh Ethiopia tanpa persetujuan dari negara hulu yang kian meningkatkan tensi konflik antara negara hulu dan hilir.<sup>20</sup>

### 1.2.1. Pembatasan Masalah

Dalam tulisan akademis ini, penulis membatasi cakupan bahasan dikarenakan keterbatasan waktu, materi dan hal – hal lainnya agar dapat memudahkan peneliti untuk fokus dalam pembahasan yang tajam. Cakupan dari negara *riparian* yang terlibat dalam sengketa Nil dibatasi dari 11 negara hanya menjadi 2 negara sentral, yaitu Mesir dan Ethiopia. Hal tersebut dilakukan agar penulis dapat melakukan analisa komparatif terhadap naiknya kekuatan struktural oleh Ethiopia dalam melawan dominasi Mesir di Nil. Disisi lain penulis mengecualikan Sudan yang sebenarnya terlibat dalam perjanjian 1929 dan 1959 menjadikannya salah satu negara yang mendominasi aliran air Nil bersama Mesir. Namun penulis melihat Sudan hanya menjadi konstanta di dalam sengketa Nil dikarenakan kekuatannya yang tidak terlalu signifikan di dalam konfigurasi hidropolitik di Nil.

Oleh karena itu penulis hanya akan menganalisa tindakan-tindakan yang berkaitan secara langsung terhadap pergeseran kekuatan di Nil secara struktural baik itu dari Mesir maupun dari Ethiopia. Penulis juga membatasi rentang waktu penelitian dari tahun 1999 hingga tahun 2019. Tahun 1999 adalah tahun kebangkitan negara-

---

<sup>20</sup>Loscow, von Tobias. “*Egypt’s Nile Water Policy under Sisi. German Insitute for International and Security Affairs.*” Hlm. 2

negara hulu oleh Ethiopia, dimana Ethiopia berhasil membawa kembali isu “*equitable use*” ke dalam agenda hidropolitik di Nil. Lewat keikutsertaanya di dalam *Nile Basin Initiatives* Ethiopia bersama dengan negara hulu lainnya melakukan kontestasi terkuat mereka di abad ke-21 melawan hegemoni Mesir. Rentang penelitian ini akan dibatasi sampai pada tahun 2019 dimana Ethiopia mulai melakukan penolakan-penolakan di dalam forum dan negosiasi yang berkaitan dengan alokasi air Nil, hak historis dan alami Mesir serta pembahasan mengenai *Grand Ethiopian Renaissance Dam*, yang menunjukkan betapa signifikannya peningkatan kekuatan struktura Ethiopia hingga tahun 2019.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang, identifikasi masalah serta pembatasan masalah yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu adanya kajian terhadap upaya-upaya Ethiopia dalam melawan dominasi Mesir Nil. Untuk itu peneliti merumuskan pertanyaan penelitian **“Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ethiopia dalam melawan dominasi Mesir di Nil?”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa Ethiopia telah berhasil melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap dominasi Mesir di Nil untuk menjadi hegemoni baru menggantikan Mesir di Cekungan Sungai Nil.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu

- a. Secara praktis menjadi prasyarat untuk kelulusan peneliti dalam menempuh studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan;
- b. Memberikan perspektif baru mengenai sengketa Sungai Nil dari sudut pandang Ethiopia;
- c. Memberikan perspektif baru terhadap efektifitas hukum internasional yang mengatur *property rights* termasuk sungai yang bersifat *transboundary*;
- d. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber ataupun rujukan bagi penstudi lainnya dalam memahami sengketa Sungai Nil dan perang Ethiopia dalam melawan dominasi Mesir di Nil.

- e. Tulisan ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap penelitian di regional Afrika tentang studi sengketa Sungai Nil.

#### **1.4 Kajian Literatur**

Berbicara mengenai sengketa Sungai Nil dan bangkitnya Ethiopia dalam menentang *status-quo* dari negara hilir di Nil terdapat berbagai pembahasan dan pandangan dari berbagai akademisi yang menyoroti dinamika hidro-politik di Nil terutama semenjak kebangkitan Ethiopia di pertengahan abad ke-20 yang membuatnya menjadi figur sentral negara hulu dalam perlawanannya melawan hegemoni Mesir di Nil.

Menurut Terje Tvedt dalam tulisannya "*The River Nile in Post Colonial Age*", ia mempercayai bahwa tindakan Ethiopia di abad ke-21 mulai memiliki dampak yang signifikan terhadap pergeseran keseimbangan kekuatan di Cekungan Sungai Nil. Tvedt menyoroti upaya pemerintah Ethiopia di tahun 1999 yang memberlakukan *national water resources management policy* untuk pertama kalinya dilanjutkan dengan proklamasi manajemen air pada tahun 2000. Tindakan legislatif tersebut menurut Tvedt adalah bukti bahwa pendekatan kontemporer oleh Ethiopia berfokus kepada tujuan pengelolaan air Nil dengan prinsip, "*efficient*", "*equitable*", serta "*optimal*". Tvedt juga percaya bahwa *status-quo* di Nil lambat laun akan melemah dikarenakan bangkitnya negara-negara hulu seperti Ethiopia yang sadar akan peningkatan

kebutuhan air mereka.<sup>21</sup> Melalui *Nile Basin Initiatives* (NBI), negara hulu dapat meregulasi Nil secara adil dan merata bagi tiap-tiap negara *riparian* Nil.

Argumen tersebut didukung oleh Gebreluel yang berpendapat bahwa dinamika sengketa Nil terutama dalam proses negosiasi sangat dipengaruhi oleh tekanan domestik dan simbolik. Disatu sisi Nil merupakan bagian dari sejarah dan identitas bagi Mesir. Disisi lain, kapasitas negara hulu baru-baru ini menjadi lambang kebangkitan mereka dari marginalisasi ekonomi dan politik. Konstruksi *GERD* secara khusus berpengaruh secara signifikan terhadap upaya Ethiopia dalam proyek *nation-building*, dan menandakan adanya perjuangan politik regional dalam posisi *allegiance* (kesetiaan) maupun *leadership* (kepemimpinan) di Nil. Keberhasilan Ethiopia dalam menyatukan negara hulu Nil untuk meratifikasi CFA meskipun terus diintervensi secara politik oleh Mesir.<sup>22</sup>

Disamping itu terdapat juga pandangan dari beberapa akademisi yang pesimistis terhadap kebangkitan Ethiopia dalam melawan dominasi Mesir di Nil. Hal tersebut dikemukakan oleh Nurit Kliot dalam tulisannya "*Water Resources and Conflict in the Middle East*" yang mengemukakan bahwa rezim legal dan konfigurasi geopolitik di Nil telah dibentuk berdasarkan tiga perjanjian yang telah dibuat di dalam Cekungan Sungai Nil yang membatasi terintegrasinya pemakaian air di Nil oleh

---

<sup>21</sup> Terje Tvedt. "*The River Nile in the Post Colonial Age.*" Conflict and Cooperation in the Nile Basin Countries. (2009)

<sup>22</sup> Gebreluel, Goitom. "*Ethiopia's Grand Renaissance Dam: Ending Africa's Oldest Geopolitical Rivalry?*" The Washington Quarterly 37 (2014): 7

seluruh negara *riparian*. “*Owen Fall’s Dam Agreement*” hanya diperuntukkan bagi keuntungan Mesir dan Uganda, *Aswan High Dam Agreement* hanya dibentuk demi kepentingan Mesir dan Sudan sementara “*Kagera Basin Agreement*” yang sebenarnya melibatkan seluruh negara *riparian* namun diimplementasikan terlalu cepat sehingga tidak berdampak terhadap majunya wacana pemakaian Nil secara adil dan merata. Meskipun Ethiopia telah berkali-kali mengklaim bahwa penggunaan Nil adalah bagian dari kedaulatan negaranya, Mesir telah menciptakan basis legal terlebih dahulu bersama negara-negara terdekatnya membuat perlawanan terhadap *status quo* di Nil menjadi semakin sulit. Kekuatan Mesir secara struktural di Nil juga telah membuatnya menjadi hegemoni di regional Nil yang diakui oleh negara-negara *riparian* Nil lainnya.<sup>23</sup>

Argumen tersebut didukung oleh Abadir M. Ibrahim dalam tulisannya yang berjudul “*The Nile Basin Cooperative Framework Agreement: The Beginning of the End of Egyptian Hydro-Political Hegemony*” dimana ia mempercayai bahwa meskipun strategi kontra hegemoni oleh negara-negara hulu Nil terutama Ethiopia sebenarnya telah berhasil dilakukan namun upaya kontra hegemoni tersebut tidak dapat menggeser hegemoni Mesir di Nil. Ibrahim menegaskan bahwa Mesir adalah negara yang tidak akan mengorbankan pencapaiannya dalam mengontrol Nil sepenuhnya. Hal tersebut tercermin dari penolakan Mesir dalam perundingan *Nile Basin Cooperative Framework Agreement* artikel 14(b) tentang keamanan air. Satu-satunya cara agar

---

<sup>23</sup> Kliot, N. “*Water Resources and Conflict in the Middle East.*” (2004): 3

dominasi Mesir di Nil dapat terkalahkan adalah membangun narasi kontra hegemoni lewat CFA yang disokong oleh upaya kontrol dan input yang independen dari Mesir.<sup>24</sup>

Dari berbagai macam perdebatan tersebut, peneliti akan memfokuskan penelitian ini untuk menjelaskan bahwa Ethiopia telah berhasil melakukan upaya kontra hegemoni dalam melawan hegemoni Mesir di Nil pada abad ke-21. Senada dengan Tvedt dan Gebreluel, penulis mempercayai bahwa kebangkitan Ethiopia di abad ke-21 secara struktural telah mengubah konfigurasi hidropolitik di Nil. Kontestasi Ethiopia terhadap hegemoni Mesir di Nil melalui pembangunan GERD di tahun 2011 menjadi simbol kekuatan tidak hanya bagi Ethiopia namun juga bagi negara-negara hulu secara keseluruhan, untuk mengubah *status quo* di Cekungan sungai Nil.<sup>25</sup>

## 1.5. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas kebangkitan Ethiopia dalam melawan dominasi Mesir di Nil penulis menggunakan **teori *Hydro-hegemony* dan *Counter-hegemony* dari Mark Zeitoun, Zeroen Warner, serta Ana Elisa Cascão** yang memiliki beberapa indikator terstruktur yang dapat digunakan untuk memudahkan analisis dalam tulisan ini. Kedua

---

<sup>24</sup> Ibrahim M., A. "The Nile Basin Cooperative Framework Agreement: The Beginning of the End of Egyptian Hydro-Political Hegemony." *Journal of Environmental and Sustainability Law* 18 (2011): 1-33

<sup>25</sup> Endalcachew, Bayeh. "New Development in the Ethio-Egypt Relations Questioning its True Prospects." *Academic Research Journals*. (2015): 1-8.

pendekatan ini sangat berkaitan satu sama lainnya dimana teori *hydro hegemony* adalah salah satu bentuk konsekuensi dari relasi hidropolitik yang terjadi dalam suatu lingkungan sungai tertentu.

Asumsi utama dalam teori *hydro-hegemony* adalah adanya hegemon yang aktif dalam level sungai (*basin scale*) yang terjadi ketika kontrol terhadap aliran air sungai yang bersifat lintas batas negara dikonsolidasikan oleh aktor yang paling kuat.<sup>26</sup> Menurut Zeitoun dan Warner, *hydro-hegemon* sendiri adalah suatu aktor tertentu yang mempunyai kekuatan (*power*) yang dapat mempertahankan kontrol dengan cara lain selain dengan represi. Kondisi *hydro-hegemony* disebabkan oleh adanya asimetri kekuatan dalam sebuah sistem antara hegemon dan non-hegemon. Berdasarkan jenis tindakannya *hydro-hegemon* dibagi menjadi dua yaitu yaitu *positive hegemon* atau *negative hegemon (dominative)*.<sup>27</sup>

Hegemoni positif (*positive hydro-hegemony*) terjadi ketika hegemon memainkan peran sebagai pemandu dan mengambil tindakan-tindakan yang menguntungkan bagi keseluruhan negara *riparian* lainnya. Sementara hegemoni negatif (*negative hydro-hegemony*) terjadi ketika suatu hegemon justru memperburuk kesenjangan antara negara yang paling kuat dan yang paling lemah, yang menghasilkan ketidaksetaraan dalam sebuah sistem sungai tertentu.<sup>28</sup> Menurut Zeitoun, Warner dan Cascão ada empat

---

<sup>26</sup> Luzi, Samuel. Double-Edged Hydropolitics on the Nile. *Swiss Federal Institute of technology Zurich*. Hlm. 40-51

<sup>27</sup> Ana Elisa Cascão and Mark Zeitoun. "Power, Hegemony and Critical Hydropolitics." (2010): 27

<sup>28</sup> Mark Zeitoun and Zeroen Warner. "Hydro hegemony – a framework fo analysis of trans-boundary water conflicts." *Water Policy* 8, no. 5, (2006): 435-460

dimensi *power* yang dapat mengevaluasi situasi *hydro-hegemony* yaitu: (1) *geographic power*, (2) *material power*, (3) *bargaining power*, (4) *ideational power* yang diklasifikasikan menjadi *overt* (nampak) dan *covert* (tidak tampak):<sup>29</sup>

(1) *Geographic power* tergolong didalam kekuatan yang nampak (*overt power*) yang paling influensial yang diperoleh secara inheren berdasarkan letak geografis *riparian* di Cekungan Sungai. Pada dasarnya, negara yang secara geografis berada di hulu suatu sungai tertentu memiliki keunggulan dalam *influential power position* dibandingkan negara yang terletak hilir sungai. Dengan kata lain, negara hulu memiliki kekuatan dan potensi untuk memanipulasi aliran air ke hilir yang kemudian dapat digunakan sebagai ancaman bagi negara-negara hilir.

(2) *Material power* adalah bentuk kekuatan yang paling nampak (*overt power*) yang meliputi kekuatan ekonomi, militer, teknologi dan dukungan finansial internasional. Jenis kekuatan ini sangat berpengaruh terutama jika secara kumulatif digabungkan dengan *bargaining* dan *ideational power*.

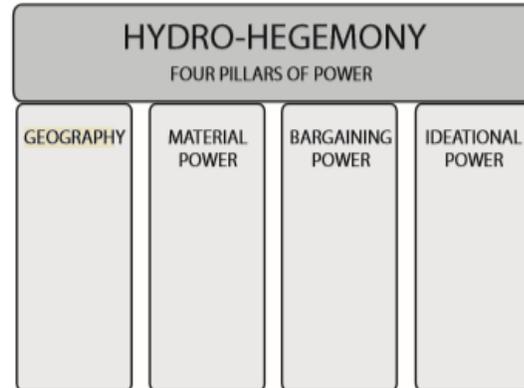
(3) *Bargaining power* tergolong sebagai kekuatan yang tidak tampak (*covert power*) yang pada dasarnya adalah kapabilitas suatu negara untuk mengontrol “aturan main” (*rules of the game*) serta agenda hidropolitik

---

<sup>29</sup> Ejigu, Natan Aslake. “*Construction of Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Nile: Cause for Cooperation or Conflict among Egypt, Ethiopia and Sudan*. Master’s Thesis., (University of Tampere, 2016).

dalam artian kemampuan untuk menentukan parameter politik dari suatu agenda. Daya tawar tersebut digunakan dalam mempengaruhi negosiasi dan perjanjian melalui pengaruh mereka untuk menyediakan atau mempengaruhi insentif untuk mendorong aktor-aktor yang lebih lemah turut terhadap aktor yang lebih kuat.

(4) *Ideational power* adalah bentuk kekuatan yang mengacu pada “kekuatan atas gagasan” dimana suatu negara dapat memaksakan atau meligitmasi gagasan dan narasi tertentu. Kekuatan ideasional memungkinkan suatu hegemon untuk mengontrol persepsi di dalam masyarakatnya sendiri dan juga negara-negara lain, memperkuat legitimasinya. Strategi yang paling umum digunakan adalah *delay* serta *active stalling* atau penundaan proses berjalannya suatu negosiasi demi mencapai tujuan tertentu.

Tabel 1.1 Empat pilar *hydro-hegemony*

Sumber: Ana Elisa Cascão and Mark Zeitoun. (2010). *Power, Hegemony and Critical Hydropolitics*. Hlm. 32

Selanjutnya, konsep kontra hegemoni (*counter-hegemony*) menjelaskan bahwa negara-negara yang mempersepsikan adanya bentuk-bentuk negatif dari suatu *hydro-hegemon* akan melakukan tindakan dan strategi kontra hegemoni untuk memperbaiki situasi yang ada.<sup>30</sup> Dalam mencapai tujuan utama yaitu “*shared control*” atas sumber air dari *hydro-hegemon*, negara non-hegemoni akan memaksimalkan upayanya dalam kekuatan dimensi kedua atau *agenda framing (second-dimension) power*. Kekuatan tersebut akan mencakup moralitas dan hukum internasional, *delay*, de-sekuritisasi, tautan masalah, sumber alternatif ekonomi, negosiasi yang kemudian dikonversikan menjadi *daya tawar* baik secara uniter maupun kolektif.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Allan, J. A. “Water Security in the Middle East: The Hydro-Politics of Global Solutions.” *King’s College London Water Research Group*. (2002): 1-25

<sup>31</sup> Kendie, Daniel. “Egypt and the Hydro-Politics of the Blue Nile River.” *Northeast African Studies* 6 (2002): 141-169

## 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif menggunakan strategi penelitian yang berfokus pada penggunaan kata-kata daripada kuantifikasi dalam mencari dan menganalisa data. Ada dua aspek penting dalam metode ini yang meliputi, interpretasi data empirik dengan teori serta penggunaan grafik sebagai acuan analisis dalam menyimpulkan temuan-temuan.<sup>32</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>33</sup> Oleh karena itu peneliti akan menginterpretasikan data-data dan fakta yang telah sebagai hasil konstruksi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperkaya perspektif dan menyesuaikannya dengan teori untuk menghasilkan analisis kualitatif yang tajam.

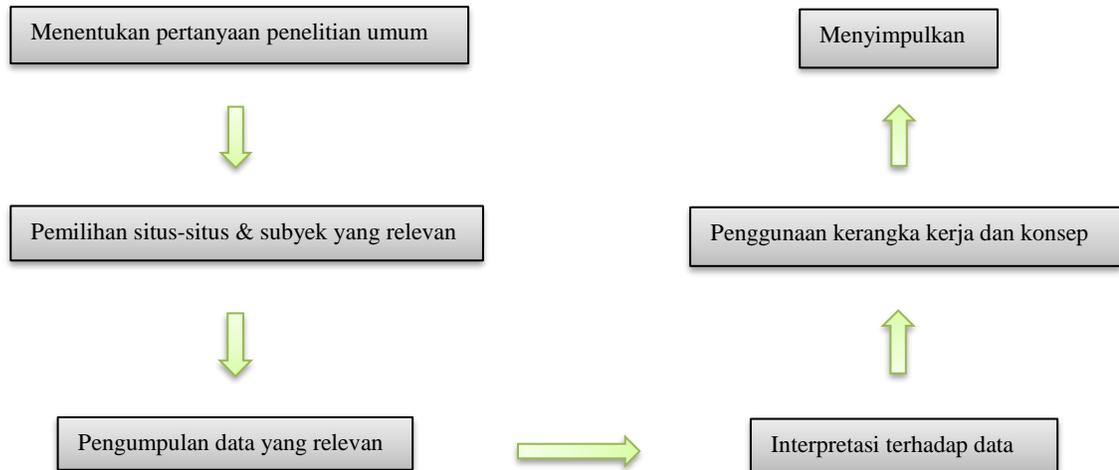
Di dalam penelitian kualitatif, terdapat langkah-langkah utama dalam prosesnya yang dijabarkan melalui grafik sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Alan Bryman, "Social Research Methods, 4<sup>th</sup> Edition (New York: Oxford University Press, 2012), hlm 380.

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1996), 5.

Grafik 1.1 Langkah-langkah Penelitian Kualitatif



Sumber: Alan Bryman. *Social Research Methods*. 4<sup>th</sup> Edition (New York: Oxford University Press), hlm 384

Pada teknik pengambilan data, peneliti memfokuskan pada kajian data-data dalam bentuk kumpulan dokumen atau teks kualitatif (studi pustaka) yang mencakup dokumen resmi dari negara, dokumen resmi yang dirilis oleh sumber swasta, dokumen virtual maupun dari media massa.<sup>34</sup>

## 1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dituangkan ke dalam 4 (empat) bab. Bab I akan membahas pendahuluan penelitian yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah,

---

<sup>34</sup> Ibid. Hlm 549

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka berpikir serta metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data.

Pada bab II akan dibahas mengenai kebangkitan Ethiopia dan penurunan hegemoni Mesir di Nil pada abad ke-21. Pada bab ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 4 (empat) sub bab. Pada sub bab pertama penulis membahas bagaimana hegemoni Mesir dapat terbentuk melalui perjanjian 1929 dan 1959 pada era kolonial serta dampaknya terhadap negara *riparian* lainnya. Pada sub bab kedua, penulis akan menjelaskan upaya Ethiopia dalam melawan *status quo* di Nil serta menggambarkan pertentangan prinsip-prinsip legal antara Mesir dan Ethiopia. Selanjutnya penulis akan membahas tentang *Nile Basin Initiatives* dan *Cooperative Framework Agreement* sebagai institusi kerjasama antar negara *riparian* dan bagaimana pengaruh Ethiopia di dalamnya terhadap runtuhnya *status quo* di Nil. Pada sub bab keempat, penulis akan menyediakan data-data mengenai kegagalan Mesir dalam mempertahankan *status quo* di Nil ke dalam empat faktor yaitu: (1) hilangnya kemampuan Mesir dalam menghalau pendanaan bendungan negara hulu, (2) melemahnya propaganda dan ancaman militer Mesir, (3) ketidakmampuan Mesir menentukan agenda hidropolitik dalam NBI, dan (4) melemahnya kepemimpinan Mesir di Nil.

Pada bab III penulis akan menganalisa kebangkitan Ethiopia secara struktural dan dampaknya terhadap konfigurasi hidropolitik di Nil. Pada bab ini, penulis akan menjabarkan analisa kedalam tiga sub bab. Dalam sub bab pertama, penulis akan berfokus kepada tindakan kontra hegemoni yang dilakukan oleh Ethiopia bersama

negara-negara hulu lainnya. Kemudian pada sub bab kedua, penulis akan menjelaskan bahwa peningkatan daya tawar oleh Ethiopia juga disertai dengan determinasi Ethiopia untuk menjadi hegemoni di Nil. Setelah itu pada sub bab ketiga penulis menganalisa bagaimana perubahan kekuatan struktural Ethiopia menurut empat pilar teori *hydro hegemony* yang meliputi, (1) letak geografis Ethiopia, (2) kekuatan material Ethiopia, (3) daya tawar Ethiopia, serta (4) kekuatan ideasional Ethiopia.

Pada bab IV penulis akan menyimpulkan temuan-temuan dari pembahasan pada Bab III yang telah didukung oleh data dari Bab II, sekaligus menjawab rumusan permasalahan yang ada di Bab I.